

## Sosialisasi Kebijakan Kurikulum Mata Pelajaran Pilihan Koding Dan Kecerdasan Buatan Kepada Guru Di Kabupaten Pinrang

Putri Dzakilla Handayani<sup>1\*</sup>, Anisa Fitri<sup>2</sup>, Nina Agustina<sup>3</sup>, Nurul Ayuni<sup>4</sup>, Sukma Riski Ananda<sup>5</sup>

<sup>1</sup> Universitas Negeri Makassar, Makassar, Indonesia

<sup>2</sup> Universitas Negeri Makassar, Makassar, Indonesia

<sup>3</sup> Universitas Negeri Makassar, Makassar, Indonesia

<sup>4</sup> Universitas Negeri Makassar, Makassar, Indonesia

<sup>5</sup> Universitas Negeri Makassar, Makassar, Indonesia

\*Korespondensi : [putri.dzakilla@unm.ac.id](mailto:putri.dzakilla@unm.ac.id)

### Info Artikel

**Diajukan:** 02-01-2026

**Diterima:** 22-02-2026

**Diterbitkan:** 31-03-2026

#### Kata Kunci:

Sosialisasi Kebijakan;  
Implementasi Kebijakan  
Publik; Kurikulum Merdeka;  
Koding Dan AI; Komunikasi  
Kebijakan



**Lisensi:** cc-by-sa

Copyright © 2026 Putri Dzakilla  
Handayani, anisa Fitri, Nina Agustina,  
Nurul Ayuni, Sukma Riski Ananda

### Abstrak

Kebijakan mata pelajaran pilihan Koding dan Kecerdasan Buatan (AI) dalam Kurikulum Merdeka merupakan inisiatif strategis pemerintah untuk memperkuat literasi digital peserta didik di era transformasi digital. Namun, implementasi kebijakan ini di daerah seperti Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, masih menghadapi kendala komunikasi. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk mensosialisasikan substansi kebijakan mata pelajaran Koding dan AI kepada guru SMP berjumlah 25 orang perwakilan setiap sekolah di Kabupaten Pinrang, mengidentifikasi hambatan komunikasi kebijakan yang ada, serta mendorong dialog antara guru sebagai pelaksana kebijakan dan pembuat kebijakan di tingkat pusat. Kegiatan dilaksanakan dengan metode ceramah melalui penyampaian materi, diskusi kelompok, dan sesi dialog terbuka yang melibatkan guru dan perwakilan Dinas Pendidikan Kabupaten Pinrang. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sosialisasi mampu meningkatkan pemahaman awal guru mengenai kebijakan tersebut dan mendapat respons positif dari peserta. Namun demikian, ditemukan bahwa sebagian besar guru masih memiliki keterbatasan pengetahuan teknis dan kekhawatiran terhadap kesiapan infrastruktur serta kompetensi pengajaran.

*Temuan ini menegaskan perlunya sosialisasi kebijakan yang sistematis, partisipatif, dan berkelanjutan, serta pelatihan teknis yang mendampingi guru dalam proses implementasi kurikulum berbasis teknologi digital.*

## 1. PENDAHULUAN

Kebijakan Kurikulum Merdeka, khususnya pengenalan mata pelajaran pilihan Koding dan Kecerdasan Buatan (AI), merupakan salah satu inisiatif pendidikan paling ambisius yang pernah diluncurkan pemerintah Indonesia. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah merencanakan implementasi pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial (AI) sebagai mata pelajaran pilihan mulai tahun ajaran 2025/2026. Kebijakan ini ditujukan untuk memperkuat literasi digital dan kesiapan peserta didik menghadapi perkembangan teknologi di era transformasi digital. Implementasi kurikulum *coding* dan AI tersebut disiapkan melalui regulasi Kemendikdasmen beserta penyusunan capaian pembelajaran dan perangkat pembelajaran digital. Kebijakan ini sejalan dengan agenda transformasi digital nasional dalam menghadapi Revolusi Industri 4.0 dan *Society 5.0* yang menekankan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan daya saing sumber daya manusia dan kualitas kehidupan masyarakat (Prasetyo & Sutopo, 2018).

Namun, sebagaimana lazimnya dalam studi kebijakan publik, jarak antara niat baik pembuat kebijakan dan realita pelaksanaan di lapangan kerap menjadi jurang yang lebar. Di Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana di banyak daerah lain di luar Jawa, kebijakan ini sampai di lapangan tanpa disertai sosialisasi yang memadai, tanpa petunjuk teknis yang operasional, dan tanpa kesiapan aparatur daerah yang cukup untuk mendampingi sekolah-sekolah dalam proses adaptasinya. Kondisi ini mencerminkan kegagalan komunikasi kebijakan sebagaimana dijelaskan dalam model implementasi kebijakan George C. Edwards III, di mana ketidakjelasan informasi, lemahnya koordinasi, dan inkonsistensi penyampaian kebijakan dapat menghambat efektivitas implementasi kebijakan publik (Habsana et al., 2026).

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini didesain sebagai intervensi sosialisasi kebijakan yang terstruktur, dengan tujuan: (1) menyebarluaskan substansi kebijakan mata pelajaran Koding dan AI kepada guru-guru di Kabupaten Pinrang secara komprehensif dan mudah dipahami; (2) mengidentifikasi dan mendokumentasikan hambatan-hambatan komunikasi kebijakan yang ada dalam konteks pemerintahan daerah; (3) mendorong dialog

antara guru sebagai pelaksana kebijakan di lapangan dengan substansi kebijakan yang dirumuskan di tingkat pusat; serta (4) merumuskan rekomendasi berbasis bukti lapangan bagi penguatan tata kelola sosialisasi kebijakan pendidikan di Kabupaten Pinrang.

Dari sudut pandang Ilmu Administrasi Negara, kegiatan ini bukan sekadar aktivitas penyuluhan biasa, namun merupakan sebuah praktik nyata dari administrasi publik partisipatif, di mana akademisi berperan aktif dalam menjembatani kesenjangan kebijakan yang tidak sempat diselesaikan oleh birokrasi formal. Secara substansial, pembelajaran Koding dan *Artificial Intelligence* (AI) dirancang untuk mengembangkan *computational thinking*. Menurut Ansori dalam Putri et al. (2025) *computational thinking* melibatkan kemampuan berpikir dan pemecahan masalah (*problem solving*) dengan konsep dasar informatika sehingga dapat mereduksi persoalan yang rumit menjadi persoalan yang dapat dipecahkan melalui pembatasan masalah, transformasi atau simulasi. Kegiatan sosialisasi ini berfokus pada sosialisasi kebijakan yang akan dilaksanakannya oleh kementerian. Artikel ini mendokumentasikan proses, temuan, dan analisis kritis dari kegiatan tersebut, dengan harapan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan model sosialisasi kebijakan pendidikan yang lebih efektif dan inklusif di masa mendatang.

## 2. METODE

Kegiatan pengabdian ini menggunakan metode Ceramah. Tahap persiapan dilakukan dengan melakukan koordinasi internal tim pengabdian dari Program Studi Ilmu Administrasi Negara terkait pelaksanaan kegiatan sosialisasi kebijakan kurikulum mata pelajaran Koding dan *Artificial Intelligence* (AI). Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di Kabupaten Pinrang dengan sasaran kegiatan yaitu guru SMP yang berjumlah 25 orang perwakilan masing-masing sekolah. Pada tahap ini, tim menyusun materi sosialisasi yang memuat gambaran umum kebijakan, tujuan penerapan mata pelajaran, serta relevansinya terhadap pengembangan kompetensi pendidikan di sekolah.

Tahap pelaksanaan dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dengan Metode Ceramah (*Transfer of Knowledge*) yang diikuti oleh guru dan pihak sekolah yang dilaksanakan sekitar 60 menit untuk menyampaikan urgensi penerapan kebijakan kurikulum baru dan memberikan pemahaman akan pentingnya menyesuaikan dengan kondisi perkembangan teknologi saat ini, setelah itu melaksanakan *Fokus Group Discussion* (FGD) untuk memberikan pandangan dari berbagai pihak dan latar belakang guru terkait pemahaman dan kesiapan untuk menghadapi kurikulum tersebut. Kegiatan diawali dengan

penyampaian materi mengenai kebijakan kurikulum mata pelajaran Koding dan *Artificial Intelligence* (AI), termasuk latar belakang penerapan, manfaat, serta tantangan yang mungkin dihadapi dalam implementasinya di lingkungan sekolah. Selama kegiatan berlangsung, peserta diberikan kesempatan untuk berdiskusi dan menyampaikan pandangan maupun pertanyaan terkait kebijakan tersebut. Interaksi yang terjadi dalam sesi diskusi menunjukkan adanya perhatian dan ketertarikan peserta terhadap penerapan kurikulum baru, khususnya dalam kaitannya dengan kesiapan guru dan sarana pendukung pembelajaran. Hasil diskusi kelompok kemudian dikumpulkan dalam sesi pleno yang diikuti dengan dialog terbuka. Sesi dialog terbuka ini menjadi salah satu momen paling bermakna dalam keseluruhan kegiatan karena guru-guru dengan bebas mengungkapkan kekhawatiran, mengajukan pertanyaan kritis, bahkan dengan cara yang santun mengungkapkan ketidaksetujuan terhadap beberapa aspek kebijakan yang menurut mereka tidak realistis. Forum ini dikelola dengan prinsip bahwa setiap suara peserta adalah data yang berharga, dan bahwa fungsi sosialisasi kebijakan bukan untuk memaksa penerimaan bulat-bulat, melainkan untuk menciptakan pemahaman yang jujur dan berinformasi, bahkan jika itu berarti mengakui keterbatasan kebijakan yang ada. Kegiatan ditutup dengan sesi refleksi bersama dan penyampaian kesimpulan serta rencana tindak lanjut oleh perwakilan Dinas Pendidikan.

Evaluasi kegiatan dirancang sepenuhnya dalam kerangka kualitatif, konsisten dengan pendekatan metodologis yang dipilih. Tahap evaluasi dan refleksi dilakukan pada akhir kegiatan untuk mengetahui tanggapan peserta terhadap pelaksanaan sosialisasi. Evaluasi dilakukan melalui diskusi singkat dan penyampaian pendapat peserta mengenai pemahaman mereka terhadap materi yang telah diberikan melalui pertanyaan yang diberikan yaitu, Bagaimana tingkat pemahaman Bapak/Ibu terhadap materi kebijakan kurikulum Koding dan *Artificial Intelligence* (AI) yang telah disampaikan? Sejauh mana materi yang diberikan dapat membantu Bapak/Ibu dalam memahami implementasi kebijakan kurikulum di sekolah? Apa kendala dan kebutuhan yang diperlukan untuk mendukung implementasi mata pelajaran Koding dan *Artificial Intelligence* (AI) di sekolah?. Selain itu, peserta juga menyampaikan harapan, masukan, serta kebutuhan yang diperlukan dalam mendukung implementasi kebijakan kurikulum mata pelajaran Koding dan *Artificial Intelligence* (AI) di sekolah. Hasil refleksi tersebut menjadi bahan evaluasi bagi tim pengabdian untuk melihat efektivitas kegiatan sosialisasi sekaligus menjadi dasar pertimbangan dalam pelaksanaan kegiatan lanjutan.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui sosialisasi kebijakan kurikulum mata pelajaran pilihan Koding dan Kecerdasan Buatan (*Artificial Intelligence/AI*) kepada guru SMA/SMK di Kabupaten Pinrang berjalan dengan baik dan mendapatkan respons positif dari peserta. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya memberikan pemahaman awal kepada guru mengenai arah kebijakan pendidikan yang mulai berorientasi pada penguatan literasi digital, teknologi, dan pengembangan kompetensi abad ke-21. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Prihatin (2025) bahwa integrasi koding dan kecerdasan buatan (AI) dalam Kurikulum Merdeka merupakan respons strategis terhadap tantangan abad ke-21 dan perkembangan teknologi global.

Tahap persiapan dilakukan dengan melakukan koordinasi internal tim pengabdian terkait pelaksanaan kegiatan sosialisasi kebijakan kurikulum mata pelajaran Koding dan *Artificial Intelligence* (AI). Pada tahap ini, tim menyusun materi sosialisasi yang memuat gambaran umum kebijakan, tujuan penerapan mata pelajaran, serta relevansinya terhadap pengembangan kompetensi pendidikan di sekolah. Selain itu, tim juga melakukan komunikasi dengan pihak sekolah untuk menentukan waktu, tempat, dan peserta kegiatan agar pelaksanaan sosialisasi dapat berjalan dengan baik dan sesuai sasaran.

Koordinasi teknis dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Pinrang dilakukan melalui tiga kali rapat koordinasi yang membahas mekanisme surat undangan resmi kepada sekolah-sekolah sasaran, pengaturan tempat dan logistik kegiatan, pembagian peran antara tim pengabdian dan pejabat dinas dalam acara pembukaan dan penutupan, serta rencana tindak lanjut pasca-sosialisasi. Komitmen dari Dinas Pendidikan untuk tidak hanya menjadi "peminjam gedung" tetapi aktif terlibat sebagai mitra strategis dalam kegiatan ini merupakan pencapaian penting yang diyakini berkontribusi pada legitimasi kegiatan di mata peserta.

Selama kegiatan pengabdian hasil koordinasi menunjukkan adanya dukungan dari pihak sekolah dan Dinas Pendidikan terhadap pelaksanaan kegiatan, terutama karena kebijakan mata pelajaran Koding dan AI dinilai relevan dengan perkembangan pendidikan saat ini. Dukungan tersebut terlihat dari keterlibatan pihak sekolah dalam memfasilitasi peserta dan kesiapan mengikuti kegiatan sosialisasi. Selain itu, pada tahap persiapan ditemukan bahwa sebagian besar guru masih memiliki pemahaman yang terbatas mengenai implementasi pembelajaran berbasis teknologi digital di sekolah. Kondisi ini terlihat dari berbagai pertanyaan awal peserta mengenai kesiapan guru, model pembelajaran, dan sarana pendukung pembelajaran berbasis teknologi.



**Gambar 1.** Tahap Persiapan

Hasil tersebut sejalan dengan penelitian Ilham et al. (2025) yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran menjadi salah satu strategi untuk menyiapkan sumber daya manusia yang siap menghadapi tantangan dunia kerja di masa depan, mengingat peran pentingnya dalam sektor pendidikan. Oleh karena itu, kepala sekolah serta instansi terkait, seperti dinas pendidikan, perlu memberikan perhatian serius terhadap integrasi teknologi pendidikan, khususnya di lingkungan pendidikan formal. Saat ini, teknologi pendidikan telah berkembang menjadi pendekatan yang tidak hanya berfokus pada aspek teoritis, tetapi juga menekankan penerapan praktis. Berbagai proses, sumber daya, dan sistem yang melibatkan peran manusia dapat dirancang, dikembangkan, dimanfaatkan, dikelola, hingga dievaluasi secara komprehensif melalui penggunaan teknologi ini.



**Gambar 2.** Tahap Pelaksanaan

Selama pelaksanaan kegiatan, peserta diberikan ceramah terkait penjelasan mengenai kebijakan kurikulum mata pelajaran pilihan Koding dan AI, termasuk tujuan penerapan, manfaat, serta tantangan implementasinya di sekolah. Dalam sesi diskusi, sebagian besar guru menyampaikan bahwa

mereka masih memiliki keterbatasan pengetahuan terkait penerapan pembelajaran berbasis teknologi, khususnya dalam penggunaan media digital dan pemanfaatan AI dalam proses pembelajaran. Beberapa peserta juga menyampaikan kekhawatiran mengenai kemampuan guru dalam mengajarkan materi Koding dan AI apabila kebijakan tersebut diterapkan secara penuh di sekolah. Mengingat bahwa mata pelajaran ini merupakan mata pelajaran pilihan bagi siswa untuk dilaksanakan di jenjang SD, SMP, SMA/SMK.

Meskipun demikian, kegiatan sosialisasi menunjukkan adanya antusiasme peserta terhadap kebijakan tersebut. Guru menilai bahwa mata pelajaran Koding dan AI dapat menjadi peluang untuk meningkatkan kemampuan digital peserta didik sekaligus mempersiapkan mereka menghadapi perkembangan teknologi di masa depan. Selain itu, peserta juga melihat bahwa pemanfaatan teknologi digital dapat membantu guru dalam pengembangan media pembelajaran dan peningkatan kreativitas pembelajaran di kelas. Menurut pendapat guru informatika AA “kebijakan ini bisa sangat baik dikembangkan di sekolah apalagi minat siswa terhadap teknologi sangat tinggi, sehingga percepatan pembelajaran sangat bisa dirasakan siswa, namun kendala yang di dapat terkait dengan sumber daya manusia yaitu guru yang mendalami keahlian atau basic dari informatika masih minim disekolah”

Temuan ini sejalan dengan penelitian Rumiyadi et al. (2026) Dari perspektif peran guru, hasil penelitian menunjukkan adanya pergeseran signifikan dari peran tradisional sebagai penyampai informasi menuju fasilitator dan mentor literasi digital. Guru tidak hanya berfokus pada penyampaian konten, tetapi juga membimbing peserta didik dalam berpikir kritis, berkolaborasi, dan menggunakan teknologi secara etis dan bertanggung jawab. Penelitian tersebut menekankan bahwa penggunaan teknologi pendidikan membutuhkan kesiapan guru serta dukungan sistem pembelajaran yang sesuai agar implementasinya berjalan optimal.

Dalam proses diskusi dan refleksi kegiatan, peserta juga menyampaikan bahwa implementasi kebijakan kurikulum mata pelajaran Koding dan AI tidak hanya membutuhkan pemahaman konseptual, tetapi juga pelatihan teknis yang berkelanjutan. Guru berharap adanya kegiatan lanjutan berupa pelatihan praktis dan pendampingan implementasi pembelajaran berbasis teknologi di sekolah masing-masing. Hal tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan utama guru tidak hanya pada pemahaman kebijakan, tetapi juga peningkatan kompetensi praktis dalam penggunaan teknologi pembelajaran.

Hasil dari pertanyaan evaluasi pengabdian menunjukkan bahwa pendapat dari guru mengatakan “kegiatan sosialisasi memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai arah dan tujuan kebijakan kurikulum yang sedang diterapkan. Sebelumnya, guru hanya memperoleh informasi secara umum melalui berbagai sumber, namun melalui kegiatan ini guru memperoleh penjelasan yang lebih sistematis terkait implementasi kebijakan di tingkat satuan pendidikan. Guru menilai materi yang disampaikan sangat membantu dalam memahami penyesuaian perangkat pembelajaran yang diperlukan. Namun demikian, guru mengungkapkan bahwa masih diperlukan pendampingan teknis dalam penyusunan perangkat ajar yang selaras dengan kebijakan kurikulum terbaru.”



Gambar 3. Tahap *Focus Grup Discussion*

Hasil refleksi peserta tersebut sejalan dengan penelitian Fahasini et al. (2026) yang mendapatkan hasil evaluasi atas penerapan transformasi integrasi digital dalam peningkatan kemandirian belajar siswa dilakukan dengan menilai sejumlah indikator, seperti motivasi belajar, kedisiplinan, tanggung jawab, kepercayaan diri, serta inisiatif yang ditunjukkan oleh siswa. Implikasinya perlu dipandang sebagai strategi berkelanjutan yang mampu memperkuat kemandirian belajar siswa apabila didukung oleh kesiapan guru, infrastruktur, dan kultur belajar yang adaptif. Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa pengembangan kompetensi guru menjadi bagian penting dalam mendukung transformasi pendidikan digital.



**Gambar 4.** Tahap Evaluasi dan refleksi

Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian ini menunjukkan bahwa sosialisasi kebijakan kurikulum mata pelajaran pilihan Koding dan AI memberikan dampak positif terhadap peningkatan pemahaman awal guru di Kabupaten Pinrang mengenai arah kebijakan pendidikan berbasis teknologi.

Namun demikian, implementasi kebijakan tersebut masih memerlukan dukungan lanjutan berupa pelatihan, penguatan kompetensi guru, serta penyediaan sarana pembelajaran yang memadai agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara optimal.

Analisis terhadap respons peserta sosialisasi mengungkap bahwa dimensi demokrasi dan keadilan sosial dari kebijakan ini justru lebih beresonansi dengan guru-guru di Kabupaten Pinrang daripada argumen ekonomi tentang "kompetensi untuk pasar kerja". Ketika narasumber menjelaskan bahwa literasi AI adalah tentang memampukan siswa untuk tidak sekadar menggunakan teknologi, tetapi untuk memahami, mengkritisi, dan membentuknya serta bahwa ini relevan bagi siswa di mana saja, termasuk di desa nelayan dan sawah, respons peserta terlihat jauh lebih antusias dibandingkan ketika materi disajikan dalam frame ekonomi-industri.

Temuan-temuan dari kegiatan pengabdian ini memiliki implikasi yang signifikan bagi tata kelola sosialisasi kebijakan pendidikan, tidak hanya di Kabupaten Pinrang tetapi juga secara lebih luas untuk daerah-daerah dengan karakteristik serupa. Implikasi pertama berkaitan dengan perlunya kelembagaan sosialisasi kebijakan yang permanen dan sistemik di tingkat pemerintah daerah. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Affan (2021) bahwa partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah memiliki fungsi penting, antara lain sebagai sarana bagi masyarakat baik orang perseorangan, kelompok masyarakat, maupun organisasi kemasyarakatan dalam mengekspresikan kebutuhan dan kepentingannya sehingga proses pembentukan kebijakan daerah lebih responsif terhadap kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Sosialisasi kebijakan tidak seharusnya menjadi kegiatan insidental yang dilakukan hanya ketika ada tekanan dari atas atau ketika ada inisiatif dari pihak ketiga seperti kegiatan pengabdian ini. Ia perlu diinstitutionalkan dalam struktur dan anggaran Dinas Pendidikan sebagai fungsi yang berkelanjutan, dengan staf yang memiliki kompetensi komunikasi kebijakan yang memadai.

Implikasi kedua adalah pentingnya desain komunikasi kebijakan yang kontekstual dan partisipatif. Menurut Simamora et al. (2025) bahwa Komunikasi merupakan penyampaian pesan dan informasi dari pemberi pesan kepada penerima pesan. Komunikasi sangat diperlukan karena didalamnya terdapat pesan-pesan yang bersifat persuasif. Komunikasi kebijakan yang efektif bukan sekadar penyampaian informasi dari atas ke bawah, melainkan proses dialogis yang memberi ruang kepada pelaksana kebijakan di lapangan untuk mengajukan pertanyaan, menyampaikan kekhawatiran, dan bahkan memberikan umpan balik yang dapat menjadi masukan bagi penyempurnaan kebijakan. Model sosialisasi yang dikembangkan dalam kegiatan ini yang menggabungkan penjelasan regulasi dengan diskusi kelompok, demonstrasi praktis, dan sesi dialog terbuka yang dapat menjadi referensi bagi pengembangan model sosialisasi yang lebih baik di masa mendatang.

Implikasi ketiga menyentuh isu desentralisasi kebijakan pendidikan yang lebih fundamental. Temuan kegiatan ini memperkuat argumen bahwa desentralisasi yang efektif bukan hanya tentang pelimpahan kewenangan, tetapi juga tentang pelimpahan kapasitas, termasuk kapasitas untuk menerima, memahami, menginterpretasikan, dan mengkomunikasikan kebijakan kepada seluruh pemangku kepentingan. Tanpa investasi yang serius dalam kapasitas kelembagaan Dinas Pendidikan daerah, desentralisasi hanya akan menghasilkan otonomi semu yang tidak benar-benar memberdayakan daerah.

Implikasi keempat berkaitan dengan peran perguruan tinggi dalam ekosistem implementasi kebijakan. Kegiatan pengabdian ini menunjukkan bahwa perguruan tinggi dapat berperan sebagai mitra strategis yang menjembatani kesenjangan antara kebijakan dan implementasi di lapangan yaitu sebuah peran yang tidak tergantikan oleh birokrasi formal tetapi juga tidak seharusnya menjadi substitusi permanen baginya. Kemitraan yang berkelanjutan antara perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan sekolah dalam

mengelola implementasi kebijakan baru merupakan model yang patut dikembangkan dan diperkuat secara sistemik.

#### **4. SIMPULAN**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa sosialisasi kebijakan kurikulum mata pelajaran pilihan Koding dan Kecerdasan Buatan (AI) kepada guru SMP di Kabupaten Pinrang telah berhasil dilaksanakan dengan baik dan mendapat respons positif dari peserta. Berdasarkan proses pelaksanaan dan hasil refleksi kegiatan, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.

Pertama, sosialisasi kebijakan yang terstruktur dan dialogis terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman awal guru terhadap substansi kebijakan mata pelajaran Koding dan AI. Guru yang sebelumnya memiliki pengetahuan terbatas mengenai kebijakan ini mampu memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai tujuan, manfaat, dan tantangan implementasinya di sekolah.

Kedua, ditemukan adanya kesenjangan komunikasi kebijakan yang signifikan antara kebijakan yang dirumuskan di tingkat pusat dan realita penerimaan kebijakan di tingkat daerah. Sebagian besar guru di Kabupaten Pinrang belum menerima informasi yang memadai mengenai kebijakan ini sebelum kegiatan sosialisasi dilaksanakan. Kondisi ini mencerminkan kelemahan sistemik dalam mekanisme diseminasi kebijakan pendidikan di daerah.

Ketiga, guru menunjukkan antusiasme terhadap potensi mata pelajaran Koding dan AI dalam meningkatkan kemampuan digital peserta didik, namun juga mengungkapkan kekhawatiran nyata terkait kesiapan kompetensi guru, keterbatasan infrastruktur teknologi, dan minimnya panduan teknis yang operasional. Temuan ini menunjukkan bahwa sosialisasi saja tidak cukup; dibutuhkan tindak lanjut berupa pelatihan teknis dan pendampingan implementasi yang berkelanjutan.

Keempat, kegiatan ini membuktikan bahwa perguruan tinggi dapat berperan strategis sebagai jembatan antara kebijakan pusat dan implementasi lapangan, terutama di daerah yang kapasitas kelembagaan Dinas Pendidikannya masih perlu diperkuat. Kemitraan antara akademisi, pemerintah daerah, dan sekolah merupakan model yang efektif dalam mendukung implementasi kebijakan pendidikan baru.

Berdasarkan temuan dan kesimpulan dari kegiatan pengabdian yang telah dilakukan oleh tim pengabdian maka, disampaikan beberapa saran kepada berbagai pemangku kepentingan sebagai berikut.

Bagi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yaitu perlu menyusun mekanisme sosialisasi kebijakan yang sistematis dan terstandar hingga ke tingkat daerah, termasuk penyediaan modul sosialisasi yang mudah dipahami oleh guru, petunjuk teknis operasional yang jelas, serta anggaran yang memadai untuk kegiatan diseminasi kebijakan di setiap kabupaten/kota.

Bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Pinrang: Perlu menginstitutionalkan fungsi sosialisasi kebijakan sebagai bagian dari tugas dan anggaran rutin Dinas Pendidikan, serta membangun kapasitas staf dalam bidang komunikasi kebijakan. Dinas Pendidikan juga diharapkan dapat menyusun program pelatihan teknis guru berbasis kebutuhan nyata di lapangan, khususnya dalam pemanfaatan teknologi digital untuk pembelajaran.

Bagi Sekolah dan Guru: Guru diharapkan secara proaktif mengembangkan kompetensi digital secara mandiri melalui berbagai platform pembelajaran daring yang tersedia, serta aktif berpartisipasi dalam komunitas belajar guru untuk saling berbagi pengetahuan dan pengalaman terkait pengajaran berbasis teknologi. Pihak sekolah disarankan untuk mendorong budaya belajar berkelanjutan di antara tenaga pendidik sebagai persiapan menghadapi implementasi mata pelajaran Koding dan AI

## **5. UCAPAN TERIMA KASIH**

Tim pengabdian menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang tulus kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang beserta seluruh jajarannya atas dukungan kelembagaan dan fasilitas yang luar biasa selama kegiatan berlangsung. Terima kasih juga kepada seluruh kepala sekolah yang telah mengizinkan dan mendorong guru-guru mereka untuk hadir, kepada guru peserta yang di tengah kesibukan tugas mengajar mereka agar bersedia meluangkan waktu dua hari penuh untuk belajar bersama.

## **DAFTAR RUJUKAN**

- Affan, I. (2021). URGENSI PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH. *DE LEGA LATA Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 128–139.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1>.
- Fahasini, L. O., Parisu, C. Z. L., & Sisi, L. (2026). Integrasi Media Pembelajaran Berbasis Teknologi untuk Membangun Kemandirian Belajar Siswa ( Studi Kasus SD IT Wahdah Islamiah Kendari ). *JMPIS: Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 7(2), 1122–1133.
- Habsana, T. Y. P., Kencono, D. S., & Fridayani, H. D. (2026). Implementation Challenges of Indonesia's Electronic-Based Government System : An

- Edwards III Perspective. *JURNAL PEMERINTAHAN DAN KEBIJAKAN (JPK)*, 7(2), 168–180.
- Ilham, R., Ratnasari, V. R., Sari, D., Dermawan, K., & Subhan, M. (2025). Pemanfaatan Teknologi Dalam Meningkatkan Kualitas Proses Belajar Mengajar. *Jurnal Teknologi Pendidikan Dan Pembelajaran ( JTPP )*, 03(01), 54–58.
- Prasetyo, H., & Sutopo, W. (2018). Industri 4.0: telaah klasifikasi aspek dan arah perkembangan riset. *J@ti Undip: Jurnal Teknik Industri*, 13(1), 17–26.
- Prihatin, M. R. (2025). KODING DAN AI DI SEKOLAH: KAJIAN LITERATUR TERHADAP KESIAPAN KURIKULUM DAN PEMBELAJARAN DI SD/SMP. *STRATEGY : Jurnal Inovasi Strategi Dan Model Pembelajaran*, 5(3), 219–231.
- Putri, A. W., Herlambang, A. D., & Zulvarina, P. (2025). Teorisi Pembentukan Computational Thinking Peserta Didik Berbasis Problem-Based Learning Berbantuan GitHub dan ChatGPT Melalui Pemrograman Web. *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer*, 9(4), 1–10.
- Rumiyadi, A., Azhar, R. C. S., Nurrahman, Y., Fahrudin, A., & Murtiyasa, B. (2026). Transformasi Kelas Digital dan Dampak Implementasi TIK terhadap Literasi Digital Pendidik: Pendekatan Mixed Methods TIN: *Terapan Informatika Nusantara*. *TIN: Terapan Informatika Nusantara*, 6(8), 1471–1480. <https://doi.org/10.47065/tin.v6i8.9169>
- Simamora, I. Y., Miko, Resty, Anur, Tazwa, Siska, Nadia, & Manda. (2025). Penerapan Konsep Komunikasi Partisipatif pada Pembangunan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Komunikasi, Administrasi Publik Dan Kebijakan Negara*, 2(3), 180–191.